

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andi Pangerang Moenta & Syafa'at Anugrah Perdana. 2018. *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- G. M. M. van Klink. 2018. *Welfare State: A Comparative Analysis*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Hadjon Philipus M. 2010. *Hukum Administrasi dan Good Governance*. Jakarta: Universitas Trisakti.
- Jazim Hamidi. 1999. *Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Layak (AAUPL) Di Lingkungan Peradilan Administrasi Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Jimly Asshiddiqie. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Press.
- M. Irsyad Thamrin dan M. Farid. 2010. *Panduan Bantuan Hukum Bagi Paralegal*. Yogyakarta : Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta.
- Marzuki Peter Mahmud. 2016. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muchsan. 1981. *Beberapa Catatan Tentang Hukum Administrasi Negara Dan Peradilan Administrasi Di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Philipus M. Hadjon, et.al. 1993. *pengantar hukum administrasi Indonesia*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia. 2015. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Ridwan HR. 2020. *Hukum Administrasi Negara*. Ed.Revisi. Cet.16. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- _____. 2009. *Hukum Administrasi Di Daerah*, Yogyakarta: FH UII Press.
- SF.Marbun. 2001. *Menggali dan Menemukan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik di Indonesia, tulisan pada Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UII Press.
- Siswanto Sunarso. 2015. *Filsafat Hukum Pidana: Konsep, Dimensi, dan Aplikasi*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.
- Soerjono Soekanto. 2012. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press.
- _____. 2022. *faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Ed.1,Cet.18, Depok : Rajawali Pers.

Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka. 1983. *menelusuri sosiologi hukum negara, jakarta* : Rajawali pers, ed.3.

UNICEF. 2014. *Hidden in Plain Sight: A Statistical Analysis of Violence Against Children*. New York: United Nations Children's Fund.

Van Wijk, H.D., en Willem Konijnenbelt. 1987. *Hoofdstukken van Administratief recht*, vuga, sGravenhage.

Skripsi, Tesis & Disertasi

Haspiani Muin. 2023. Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Penanganan Kekerasan Anak Di Kota Makassar. Skripsi. Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar.

SF. Marbun. 2001. *pembentukan, pemberlakuan, dan peranan asas asas umum pemerintahan yang layak dalam menjelmakan pemerintahan yang baik dan bersih di Indonesia*. Disertasi. Bandung : Universitas Padjadjaran.

Sri Dewi Sandra. 2022. *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Unit Pelaksanaan Teknik Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Makassar*. Tesis. Makassar : Universitas Hasanuddin

Jurnal

Agustin Widjiastuti. 2017. *Peran AAUPB Dalam Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas dari KKN*. Perspektif. Volume 22 Nomor 2.

Ahmad Jamaluddin. 2021. *Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual*. Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial. Volume 3 Nomor 2.

Ateng Syafrudin. 2000. *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*, Jurnal Pro Justitia Edisi IV, Bandung: Universitas Parahyangan.

. 1994. *Asas-asas Pemerintahan Yang Layak Pegangan Bagi Pengabdian Kepala Daerah, dalam Himpunan Makalah Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (A.A.U.P.B)*. Penyusun: Paulus Effendi Lotulung, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Fachria Octaviani & Nunung Nurwati. 2021. *Analisis Faktor dan Dampak Kekerasan Seksual pada Anak*. jurnal Ilmu Kesejahteraan sosial. Volume 3 nomor 2.

Isya Anung Wicaksono & Fatma Ulfatun Najjicha. 2021. *Penerapan asas ultimum remedium dalam penegakan hukum di bidang lingkungan hidup*. Pagaruyung law journal. Volume 5 Nomor 1.

Triana, Apriyanita. 2017. *Perlindungan Anak dan Hak Kesejahteraan Anak dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002*. Jurnal Sosial & Budaya Syar-I. Volume 4 Nomor 2.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No. 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Nomor 2 tahun 2022 tentang standar layanan perlindungan perempuan dan anak

Sumber Internet

Adi Mirsan. 2023. "516 Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Terjadi Di Makassar Sepanjang Tahun 2023, Didominasi Kekerasan Seksual", Metropolis, Edisi tanggal 29 November 2023 Tahun 2024, <https://sulsel.fajar.co.id/2023/11/29/516-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-terjadi-di-makassar-sepanjang-2023-didominasi-kekerasan-seksual/> diakses pada tanggal 13 Januari 2025 pukul. 23:56 WITA.

Deny Irwanto. 2024. "68 Anak di Kota Makassar Jadi Korban Kekerasan Seksual Selama 2024". Medcom. Edisi Tanggal 24 Juni 2024, diakses pada 22 november 2024 pukul 20:04 WITA. dari <https://www.metrotvnews.com/read/kqYCxz9R-68-anak-di-kota-makassar-jadi-korban-kekerasan-seksual-selama-2024>

Anonim. <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan> diakses pada tanggal 13 Januari 2025 pukul. 23:10 WITA

Rayya Adila Sakinah. 2024. "*Kekerasan Seksual pada Anak Jadi Ancaman Besar di 2024*". Goodstats, Edisi Tanggal 16 Oktober 2024. dari (<https://data.goodstats.id/statistic/kekerasan-seksual-pada-anak-jadi-ancaman-besar-di-2024-FIZNL>) diakses pada tanggal 13 Januari 2025 pukul 17:33 WITA.

Rilis resmi Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). 15 Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual: Sebuah Pengenalan, dapat dilihat dalam Web Resmi Komnas Perempuan <https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/15-bentuk-kekerasan-seksual-sebuah-pengenalan>. Diakses 20 November 2024 pukul 22:57 WITA